

**KOMPARASI EFISIENSI BANK PADA PEMBIAYAAN
UMKM SEBELUM DAN SESUDAH ADANYA
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 14/ 22/ PBI/ 2012**

JURNAL ILMIAH

Disusun Oleh :

**Afritasari Nurdianita
115020100111013**



**JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2015**

LEMBAR PENGESAHAN PENULISAN ARTIKEL JURNAL

Artikel Jurnal dengan judul :

**KOMPARASI EFISIENSI BANK PADA PEMBIAYAAN UMKM
SEBELUM DAN SESUDAH ADANYA PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 14/ 22/ PBI/ 2012**

Yang disusun oleh :

Nama : Afritasari Nurdianita
NIM : 115020100111013
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jurusan : S1 Ilmu Ekonomi

Bahwa artikel Jurnal tersebut dibuat sebagai *persyaratan ujian skripsi* yang dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 12 Februari 2015.

Malang, 12 Februari 2015

Dosen Pembimbing,



Tyas Danarti Hascaryani, SE., ME.

NIP. 19750514 199903 2 001

**Komparasi Efisiensi Bank pada Pembiayaan UMKM Sebelum dan Sesudah Adanya
Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/ 22/ PBI/ 2012**

Afritasari Nurdianita

Tyas Danarti Hascaryani, SE., ME.

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang

Email: afritasarinurdianita.23@gmail.com

ABSTRAK

Perputaran uang di dalam masyarakat dalam jumlah yang sangat besar membutuhkan peran bank sebagai lembaga intermediasi. Bank dalam menjalankan fungsi intermediasinya dituntut untuk efisien. Efisiensi merupakan salah satu indikator dalam mengukur kinerja bank. Apabila kinerja bank efisien maka pelayanan bank terhadap nasabah akan semakin baik, sehingga relatif berdampak positif terhadap kepercayaan nasabah yang meningkat. Konsep efisiensi pertama kali diperkenalkan Farrel (1957) yang membedakan efisiensi menjadi dua yaitu efisiensi teknis (technical efficiency) dan efisiensi alokatif (allocative efficiency), kemudian dikombinasikan untuk menghasilkan efisiensi total atau efisiensi ekonomis (economic efficiency). Pada penelitian ini pengukuran efisiensi yang akan dilakukan berdasarkan efisiensi teknis. Berdasarkan dikeluarkannya Peraturan BI No. 14/ 22/ PBI/ 2012 tentang kewajiban pemberian kredit atau pembiayaan oleh bank umum dan bantuan teknis oleh BI dalam rangka pengembangan UMKM. Namun, berdasarkan persentase NPL (Non Performing Loans) dari tahun 2013 hingga 2014, NPL terus meningkat pada NPL kredit modal kerja (termasuk didalamnya kredit UMKM) dan kredit investasi yang nilainya lebih tinggi dari NPL kredit konsumsi (dari 2,0% menjadi 2,5%). Sehingga, tujuan dari penelitian ini untuk melakukan komparasi efisiensi bank sebelum dan sesudah adanya Peraturan BI Nomor 14/ 22/ PBI/ 2012.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan deskriptif. Sampel dari penelitian ini meliputi delapan bank BUMN dan BUSN (devisa) dengan teknik purposive sampling. Variabel input dalam penelitian ini berupa DPK dan biaya operasional, sedangkan variabel outputnya berupa pembiayaan UMKM. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan periode penelitian tahun 2011 dan 2013. Metode pengolahan dan analisis data penelitian menggunakan metode Data Envelopment Analysis (DEA) yang berorientasi input dan menggunakan model VRS (Variable Returns to Scale). Software yang digunakan untuk menghitung efisiensi adalah MaxDEA dan Banxia untuk mengetahui persentase kontribusi variabel input-output dari masing-masing DMU.

Hasil dari penelitian ini terdapat perbedaan efisiensi sebelum dan sesudah adanya Peraturan BI Nomor 14/ 22/ PBI/ 2012. Efisiensi bank mengalami peningkatan dari rata-rata angka rasio 0,77 periode sebelum adanya peraturan menjadi 0,82 pada periode sesudah adanya peraturan. Sehingga, fungsi intermediasi bank tidak akan terganggu dengan adanya Peraturan BI Nomor 14/ 22/ PBI/ 2012, maka peraturan tersebut dapat terus dijalankan. Selain itu, terdapat tiga bank yang menjadi benchmark sebelum adanya peraturan yaitu Bank Rakyat Indonesia, Bank OCBC NISP, dan Bank UOB Indonesia dan sesudah adanya peraturan terdapat lima bank yang menjadi benchmark yaitu Bank Rakyat Indonesia, Bank Pan Indonesia, Bank Mega, Bank Bukopin, dan Bank UOB Indonesia. Selain itu, juga terdapat tiga bank yang memiliki angka rasio efisiensi relatif terendah dalam melakukan pembiayaan UMKM sebelum adanya peraturan yaitu Bank Central Asia, Bank Pan Indonesia, dan Bank Permata dan sesudah adanya peraturan terdapat dua bank yang memiliki angka rasio efisiensi relatif terendah yaitu Bank Central Asia dan Bank Permata. Bank-bank tersebut perlu melakukan potential improvement dan melihat kinerja dari bank-bank benchmark agar menjadi efisien dalam melakukan pembiayaan UMKM.

Kata Kunci: Komparasi, Efisiensi Bank, dan Pembiayaan UMKM

Comparison of Efficiency Bank in UMKM Financing Before and After Regulation of Bank Indonesia Number 14/ 22/ PBI/ 2012

Afritasari Nurdianita

Tyas Danarti Hascaryani, SE., ME.

Faculty of Economics dan Business University of Brawijaya Malang

Email: afritasarinurdianita.23@gmail.com

ABSTRACT

The velocity of money in public are very great so need the role of banks as intermediary institutions. Bank in carrying out the functions required for efficient intermediation. Efficiency is one of the indicators for measuring the performance of the bank. If the efficient performance of the bank, the bank services to customers the better, so that the relative positive impact on increasing customer confidence. The concept was first introduced efficiency Farrell (1957) distinguishes efficiency into two technical efficiency (technical efficiency) and allocative efficiency (allocative efficiency), and then combined to produce a total efficiency or economic efficiency (economic efficiency). In this research the efficiency measurement will be based on the efficiency of the technique. Based on the issuance of Bank Indonesia Regulation No. 14/22 / PBI / 2012 on the obligation of credit or financing by commercial banks and technical assistance by the Central Bank (BI) in the framework of the development of UMKM are expected to meet the capital needs of UMKM. However, based on the percentage of NPL (Non Performing Loans) from 2013 to 2014, continued to increase in NPL working capital loans (including UMKM loans) and credit investments is higher than the NPL consumption (from 2,0% to 2,5%). Thus, the purpose of this study was to perform a comparative efficiency of banks before and after the BI Regulation No. 14/22 / PBI / 2012.

This study uses quantitative and descriptive approach. The sample of the study include eight banks BUMN and BUSN (foreign exchange) with a purposive sampling technique. Input variables in this study are in DPK and operational cost, while the output variable is the financing of UMKM. The data used are secondary data. The study period was taken in 2011 and 2013. Methods of processing and data analysis using Data Envelopment Analysis (DEA) and using the input-oriented model of the VRS (Variable Returns to Scale). Software used to calculate efficiency is MaxDEA and Banxia to know the percentage contribution of input-output variables of each DMU.

The results of this study there are differences in efficiency before and after the BI Regulation No. 14/22 / PBI / 2012 Efficiency of banks increased from ratio average rate of 0,77 period before regulation to 0,82 period after that regulation. Thus, the bank intermediation function will not be disturbed by the presence of BI Regulation No. 14/22 / PBI / 2012, then the rules can continue to run. In addition, there are three banks that became a benchmark before the regulation: Bank Rakyat Indonesia, Bank OCBC NISP, and Bank UOB Indonesia and after the regulation are five banks that became the benchmark: Bank Rakyat Indonesia, Bank Pan Indonesia, Bank Mega, Bukopin, and Bank UOB Indonesia. In addition, there are three banks that have relatively low efficiency ratios in financing UMKM prior to the regulation: Bank Central Asia, Bank Pan Indonesia, and Bank Permata and after the regulation there are two banks that have relatively low efficiency ratios: Bank Central Asia and Bank Permata. The banks need to do and see the potential improvement of the performance benchmark banks in order to be efficient in financing UMKM.

Keywords: Comparison, Bank Efficiency, and UMKM Financing

A. PENDAHULUAN

Perputaran uang di dalam masyarakat dalam jumlah yang sangat besar membutuhkan peran bank sebagai lembaga intermediasi. Bank dalam menjalankan fungsi intermediasinya dituntut untuk efisien. Efisien yang ditekankan disini adalah kemampuan manajemen bank dalam menekan biaya (*reducing cost*). Hal ini berdasarkan pendapat Taswan (2006) yang menyatakan bahwa bank dalam menentukan porsi dana untuk operasional harus dengan biaya seminimal mungkin, yaitu melalui pengaturan komposisi tertentu agar biaya dana dapat ditekan. Efisiensi merupakan salah satu indikator untuk mengukur kinerja dari suatu bank. Apabila kinerja bank efisien maka pelayanan bank terhadap nasabah juga akan semakin baik, sehingga kepercayaan nasabah relatif akan meningkat. Konsep efisiensi pertama kali diperkenalkan Farrel (1957) yang merupakan tindak lanjut dari model yang diajukan oleh Debreu (1951) dan Koopmans (1951). Konsep pengukuran efisiensi Farrel membedakan efisiensi menjadi dua yaitu efisiensi teknis (*technical efficiency*) dan efisiensi alokatif (*allocative efficiency*). Kedua pengukuran efisiensi ini kemudian dikombinasikan untuk menghasilkan efisiensi total atau efisiensi ekonomis (*economic efficiency*). Pada penelitian ini pengukuran efisiensi yang akan dilakukan berdasarkan efisiensi teknik, tanpa memperhitungkan efisiensi secara alokatif.

Berdasarkan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia (BI) Nomor 14/ 22/ PBI/ 2012 tentang kewajiban pemberian kredit atau pembiayaan oleh bank umum dan bantuan teknis oleh Bank Indonesia (BI) dalam rangka pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu dukungan positif terhadap kebutuhan modal UMKM. Mengingat peran UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup besar yang dapat dilihat dari kemampuannya menyerap tenaga kerja sebesar 97,3% (101,7 juta) dari total tenaga kerja sehingga angka pengangguran dapat ditekan, sumbangan terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) sebesar 57,12% (Rp 8200 Triliun) dan sumbangan terhadap ekspor sebesar 20,17% dari total ekspor (Tabloid Kontan, 2013). Terdapat target pencapaian rasio pembiayaan UMKM sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BI No. 14/ 22/ PBI/ 2012 dimana tahap pertama dan kedua (tahun 2013 dan 2014), rasio pembiayaan UMKM terhadap total pembiayaan sesuai dengan kemampuan bank umum yang dicantumkan dalam rencana bisnis bank. Tahap ketiga, tahun 2015 rasio pembiayaan UMKM terhadap total pembiayaan paling rendah 5%. Tahap keempat, tahun 2016 rasio pembiayaan UMKM terhadap total pembiayaan paling rendah 10%. Tahap kelima, tahun 2017 rasio pembiayaan UMKM terhadap total pembiayaan paling rendah 15%. Tahap keenam, tahun 2018 dan tahun-tahun selanjutnya rasio pembiayaan UMKM terhadap total pembiayaan paling rendah 20%. Pembiayaan UMKM dapat dilakukan bank umum baik secara langsung maupun melalui *linkage program*.

Berdasarkan pergerakan NPL (*Non Performing Loans*) yang menggambarkan risiko penyaluran kredit menunjukkan pergerakan yang terus meningkat dari tahun 2013 hingga 2014 (BI, 2014). Peningkatan NPL terjadi pada kredit modal kerja (termasuk didalamnya kredit UMKM) dan kredit investasi yang nilainya lebih tinggi dari NPL kredit konsumsi (dari 2,0% menjadi 2,5%). Kenaikan NPL yang terjadi sesudah adanya Peraturan BI No. 14/ 22/ PBI/ 2012 mengindikasikan kredit macet yang ditanggung oleh bank relatif disebabkan dari kredit modal kerja yang mulai diarahkan kepada pembiayaan UMKM. Padahal hingga saat ini UMKM dianggap sebagai usaha dengan tingkat risiko yang relatif tinggi karena penuh dengan ketidakpastian. Kondisi ini yang nantinya dikawatirkan mengganggu kinerja bank menjadi kurang efisien, karena biaya yang ditanggung oleh bank akan lebih besar akibat meningkatnya risiko kredit. Industri perbankan tidak memiliki pilihan selain menjalankan Peraturan BI No. 14/ 22/ PBI/ 2012, karena apabila bank melanggar peraturan tersebut maka BI akan memberikan sanksi berupa sanksi administratif dalam bentuk teguran tertulis dan/ atau penurunan tingkat kesehatan bank berupa penurunan peringkat faktor manajemen dalam penilaian tingkat kesehatan.

Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini mengambil judul “Komparasi Efisiensi Bank pada Pembiayaan UMKM Sebelum dan Sesudah Adanya Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/ 22/ PBI/ 2012”. Sehingga, pokok masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kondisi efisiensi bank sebelum adanya Peraturan BI Nomor 14/ 22/ PBI/ 2012?
2. Bagaimana kondisi efisiensi bank sesudah adanya Peraturan BI Nomor 14/ 22/ PBI/ 2012?
3. Bagaimana komparasi efisiensi bank sebelum dan sesudah adanya Peraturan BI Nomor 14/ 22/ PBI/ 2012?

B. KAJIAN PUSTAKA

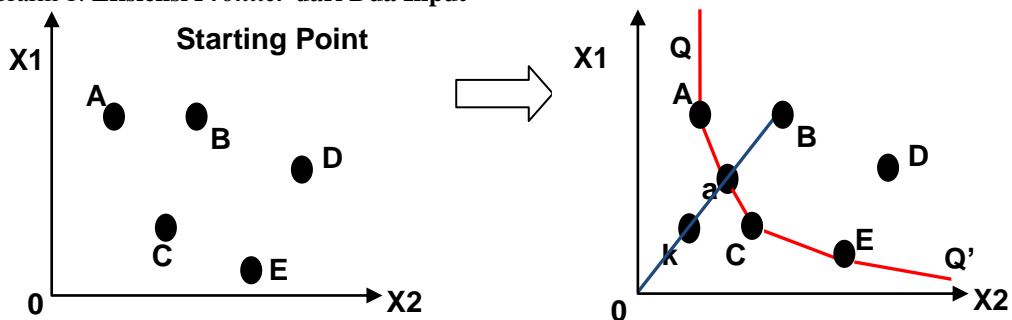
Teori Produksi dalam Konsep Efisiensi Bank

Konsep efisiensi diambil dari ekonomi mikro yaitu cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku dari unit-unit ekonomi individual (rumah tangga, perusahaan, dan struktur industri). Pada teori produksi terdapat model hubungan antara input dan output yang digambarkan dalam fungsi produksi (*production function*) sebagai berikut (Nicholson, 2002):

$$q = f(K, L)$$

dimana, produksi perusahaan hanya tergantung pada dua input yaitu modal (*capital* atau K) dan tenaga kerja (*labour* atau L). Fungsi produksi dapat digambarkan sebagai proses perubahan input menjadi output dalam satu periode yang dijelaskan oleh *production frontier*. Garis batas produksi yang terdapat dalam fungsi tersebut merupakan hubungan teknologi yang menggambarkan output maksimum yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan yang efisien dari berbagai penggunaan kombinasi input dalam beberapa periode (Farrel, 1957).

Grafik 1: Efisiensi *Frontier* dari Dua Input



Sumber: Arafat, 2006

Grafik 1 menjelaskan bahwa titik A, B, C, D, dan E merupakan lima perusahaan yang menghasilkan satu output Y yang sama jenisnya dengan menggunakan dua input X1 dan X2 yang sama jenisnya. Evaluasi efisiensi dari lima perusahaan tersebut dimulai dari pengumpulan data hasil observasi dan menarik garis lurus diantara hasil observasi yang terdekat dengan sumbu, sehingga didapatkan garis Q – Q'. Perusahaan A, C, dan E merupakan perusahaan yang paling efisien dan sebagai perusahaan dengan praktik bisnis terbaik untuk dapat dijadikan referensi (*benchmarking*) bagi perusahaan B dan D. Grafik 1 juga menunjukkan tidak terdapat perusahaan yang memproduksi dengan nilai pada titik k (di bawah garis Q – Q') karena perusahaan demikian tidak layak secara teknis. Sebuah perusahaan yang memproduksi pada titik B dan D (diatas garis Q – Q') tidak akan efisien secara teknis karena titik a menggambarkan output yang sama yang dapat dihasilkan oleh perusahaan dengan menggunakan faktor rasio input, tetapi dengan jumlah input yang lebih kecil. Rasio $0a/0B$ sebagai ukuran nyata tidak efisiennya secara teknis dari perusahaan pada titik B dan D serta menunjukkan rasio input yang secara teknis dibutuhkan terhadap input yang digunakan secara aktual untuk menghasilkan satu unit output yang sama.

Konsep Efisiensi pada Kinerja Bank

Efisiensi memiliki tiga pendekatan untuk mengetahui hubungan antara variabel input-outputnya (Hadad *et al.*, 2003), diantaranya yaitu:

1. Pendekatan produksi, dimana bank ditempatkan sebagai unit kegiatan ekonomi yang menghasilkan output berupa simpanan (*deposit accounts*) beserta kredit pinjaman (*loans*). Sedangkan inputnya berupa jumlah tenaga kerja, pengeluaran modal pada aktiva tetap, dan material lainnya. Pendekatan produksi sesuai dengan fungsi bank sebagai *agent of services*. Pendekatan ini lebih efektif untuk mengevaluasi kinerja suatu cabang dalam suatu bank.
2. Pendekatan intermediasi, dimana menempatkan bank sebagai unit kegiatan ekonomi yang bertindak sebagai perantara yaitu mentransfer aset-aset keuangan dari unit-unit yang kelebihan dana kepada unit-unit yang kekurangan dana. Pendekatan ini menjadikan total pinjaman kredit, sekuritas, dan investasi finansial sebagai output, sedangkan inputnya adalah biaya bunga pada deposit, tenaga kerja, dan modal. Pendekatan ini lebih tepat digunakan dalam

penelitian ini karena bertujuan untuk mengevaluasi kinerja efisiensi bank sebagai lembaga intermediasi.

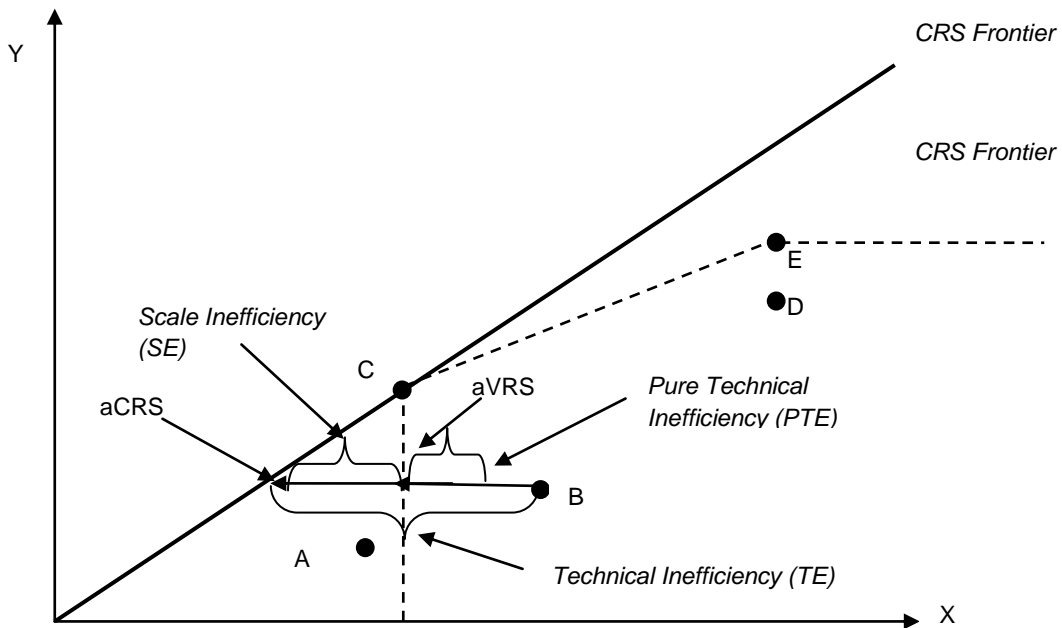
3. Pendekatan aset, merupakan pengembangan dari pendekatan intermediasi dimana bank mencerminkan fungsi utama sebuah lembaga keuangan sebagai pencipta kredit pinjaman (*loans*), sehingga output dari pendekatan ini adalah kemampuan bank dalam menghimpun dana dalam bentuk kredit, surat-surat berharga, aktiva lancar, dan alternatif aset lainnya. Input dalam pendekatan ini berupa bentuk aset yang dimiliki bank?.

Selain itu, efisiensi dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu efisiensi alokatif atau harga (*allocative efficiency*) dan efisiensi teknis (*technical efficiency*). Efisiensi teknis didefinisikan sebagai kemampuan bank untuk mencapai output semaksimal mungkin dari sejumlah input yang ada. Sedangkan, efisiensi alokatif menunjukkan kemampuan bank dalam menggunakan input dengan proporsi seoptimal mungkin melalui permainan harga input pada tingkat tertentu (Farrell, 1957). Apabila kedua efisiensi ini dikombinasikan akan menghasilkan efisiensi total atau efisiensi ekonomis (*economic efficiency*). Pada penelitian ini jenis efisiensi yang akan diteliti adalah efisiensi teknis. Efisiensi teknis sebetulnya masih dibagi lagi menjadi dua yaitu efisiensi teknis murni dan efisiensi skala usaha. Sehingga, didapatkan persamaan sebagai berikut (Arafat, 2006):

$$OE = OTE * AE = PTE * SE * AE$$

Dimana, OE (efisiensi total atau *overall efficiency*), OTE (efisiensi teknis keseluruhan atau *overall technical efficiency*), AE (efisiensi alokatif atau *allocative efficiency*), PTE (efisiensi teknis murni atau *pure technical efficiency*), dan SE (*scale efficiency*). Pendekatan *Data Envelopment Analysis* dapat dihitung dengan dua model yaitu model CRS (*Constant Return to Scale*) dan VRS (*Variable Return to Scale*).

Grafik 2: Grafik Perhitungan *Scale Economic DEA*



Sumber: Roland & Terje (2000) dalam Arafat (2006)

Perhitungan nilai efisiensi pada penelitian ini menggunakan pendekatan *frontier* (parametrik dan non-parametrik) (Silkman *et al.*, 1986). Pendekatan *frontier* parametrik dapat dilakukan melalui uji statistik parametrik dengan menggunakan metode *Stochastic Frontier Approach* (SFA) dan *Distribution Free Approach* (DFA). Sedangkan, pendekatan *frontier* non-parametrik dapat dilakukan melalui uji statistik dengan menggunakan metode *Data Envelopment Analysis* (DEA). Penelitian ini menggunakan pendekatan non-parametrik DEA. Konsep pengukuran efisiensi menggunakan DEA dapat dilihat dari dua fokus yaitu pada sisi input dan sisi output. Berikut ini penjelasan tentang kedua fokus efisiensi tersebut:

- a. Pengukuran efisiensi dengan fokus input menunjukkan seberapa banyak jumlah input dapat dikurangi secara proporsional untuk memproduksi jumlah output yang sama. Diasumsikan

sebuah perusahaan menggunakan dua jenis input yaitu X1 dan X2 untuk memproduksi satu jenis output (Y). Apabila kedua jenis input X1 dan X2 ditambah sejumlah persentase tertentu maka output juga akan meningkat dengan sejumlah persentase yang sama. Fokus input akan digunakan dalam penelitian ini.

- b. Pengukuran efisiensi dengan fokus output menunjukkan seberapa banyak jumlah output dapat ditingkatkan secara proporsional dengan jumlah input yang sama (Abidin *et al.*, 2007).

Pendekatan non-parametrik DEA memiliki beberapa asumsi yang harus dipenuhi diantaranya yakni (Ramanathan, 2003):

- a. DMU merupakan unit yang homogen atau mempunyai fungsi dan tujuan yang sama.
- b. Jumlah DMU yang dijadikan sampel besarnya minimal 2 atau 3 kali penjumlahan input dan output.

Selain itu, DEA juga dapat digunakan untuk menilai kinerja relatif DMU dengan mengidentifikasi unit kinerja terbaik dari DMU di pasar yang kompetitif, serta mengidentifikasi cara-cara untuk meningkatkan kinerja apabila DMU tersebut bukan termasuk golongan DMU dengan kinerja terbaik. DEA memiliki beberapa kelebihan seperti:

- a. DEA dapat menangani banyak input dan banyak output.
- b. Tidak memerlukan sebuah asumsi bentuk fungsional untuk menghubungkan input dengan output.
- c. DMU-DMU secara langsung dapat dibandingkan dengan pembanding sebaya atau kombinasi dari sekumpulan pembanding sebaya (*peer*).
- d. DEA memberikan peringkat efisiensi berdasarkan data numerik dan tidak menggunakan opini subyektif dari seseorang.

Namun, DEA juga memiliki keterbatasan-keterbatasan dalam pengaplikasiannya diantaranya yaitu:

- a. Dikarenakan DEA merupakan sebuah teknik titik ekstrim maka kesalahan pengukuran dapat menyebabkan masalah yang signifikan.
- b. Hasil pengolahan data dengan memanfaatkan model DEA dapat dengan baik memperkirakan efisiensi relatif dari suatu DMU dibandingkan dengan DMU lainnya namun, untuk menentukan nilai efisiensi mutlak suatu DMU secara teoritis akan sulit.

Pengukuran Kinerja Keuangan dari Bank Umum

Definisi kinerja keuangan berdasarkan Jumingan (2006) merupakan gambaran kondisi keuangan DMU pada suatu periode tertentu baik menyangkut aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dana, biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas, dan profitabilitas. Pengukuran kinerja keuangan dari bank dapat dilihat dari rasio-rasio keuangan yang dipublikasikan oleh masing-masing bank melalui laporan keuangan. Rasio yang menjadi indikator efisien atau tidaknya suatu bank diantaranya yaitu rasio BOPO, NIM, dan persentase NPL. Hal ini juga didukung pendapat dari Dendawijaya (2003) bahwa rasio-rasio keuangan yang digunakan sebagai tolak ukur kinerja bank meliputi: analisis rasio likuiditas, analisis rasio rentabilitas, dan analisis rasio solvabilitas.

Fungsi Intermediasi Perbankan Indonesia

Bank merupakan lembaga keuangan yang mengelola dana masyarakat dengan mentransfer dana dari unit-unit surplus kepada unit-unit defisit. Kegiatan utama bank inilah yang kemudian dikenal dengan fungsi intermediasi bank. Fungsi intermediasi bank dapat dilaksanakan dengan optimal apabila didukung dengan sumber permodalan yang mencukupi (Buchory, 2006). Pada penelitian ini definisi fungsi intermediasi yang digunakan berdasarkan pendapat dari Alam (2008) dimana fungsi intermediasi merupakan kegiatan bank dalam menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan (pembiayaan UMKM).

C. METODE PENELITIAN

Populasi Penelitian dan Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dan deskriptif. Sampel dari penelitian ini meliputi delapan bank Bank Umum Milik Negara/ BUMN dan Bank Umum Swasta Nasional/ BUSN (devisa) dengan teknik *purposive sampling*. Variabel input dalam penelitian ini berupa dana pihak ketiga (DPK) dan biaya operasional, sedangkan variabel outputnya berupa

pembiayaan UMKM. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang didapatkan dari neraca, laporan laba/ rugi, dan kualitas aktiva produktif yang dipublikasikan pada *website* Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sedangkan periode penelitian diambil tahun 2011 (sebelum adanya peraturan) dan tahun 2013 (sesudah adanya peraturan).

Metode Analisis Data

Efisiensi perbankan pada penelitian ini diukur dengan menggunakan pendekatan non-parametrik melalui metode *Data Envelopment Analysis* (DEA) yaitu menghitung efisiensi bank dengan menggunakan sejumlah input n untuk menghasilkan sejumlah output m . Apabila menggunakan model matematis efisiensi bank dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut (Sutawijaya & Lestari, 2009):

$$hs = \frac{\sum_{i=1}^m u_i y_{is}}{\sum_{j=1}^n v_j x_{js}} \quad (1)$$

dimana :

hs = efisiensi teknis pada Bank Rakyat Indonesia, Bank Central Asia, Bank Pan Indonesia, Bank Bukopin, Bank Mega, Bank Permata, Bank UOB Indonesia, dan Bank OCBC NISP

y_{is} = jumlah pembiayaan UMKM yang diproduksi oleh Bank Rakyat Indonesia, Bank Central Asia, Bank Pan Indonesia, Bank Bukopin, Bank Mega, Bank Permata, Bank UOB Indonesia, dan Bank OCBC NISP

x_{js} = jumlah dana pihak ketiga dan biaya operasional yang digunakan oleh Bank Rakyat Indonesia, Bank Central Asia, Bank Pan Indonesia, Bank Bukopin, Bank Mega, Bank Permata, Bank UOB Indonesia, dan Bank OCBC NISP

u_i = bobot pembiayaan UMKM yang dihasilkan oleh Bank Rakyat Indonesia, Bank Central Asia, Bank Pan Indonesia, Bank Bukopin, Bank Mega, Bank Permata, Bank UOB Indonesia, dan Bank OCBC NISP

v_j = bobot dana pihak ketiga dan biaya operasional yang diberikan oleh Bank Rakyat Indonesia, Bank Central Asia, Bank Pan Indonesia, Bank Bukopin, Bank Mega, Bank Permata, Bank UOB Indonesia, dan Bank OCBC NISP

* i dihitung dari 1 ke m serta j dihitung dari 1 ke n

Rasio perhitungan efisiensi ini kemudian dimaksimalkan dengan kendala sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^m u_i y_{ir} / \sum_{j=1}^n v_j X_{js} &\leq 1 \text{ untuk } r = 1, \dots, N \\ U_i \text{ dan } V_j &\geq 0 \end{aligned} \quad (2)$$

Hasil dari perhitungan matematika ini adalah angka rasio yang bervariasi antara 0 hingga 1. Demikian pula apabila perhitungan efisiensi menggunakan *software* MaxDEA maka variasi angka rasionya dalam satuan antara 0 hingga 1. Bank dikatakan efisien apabila memiliki angka rasio 1, sebaliknya apabila angka rasio mendekati 0 maka efisiensi bank dikatakan relatif tidak efisien. DEA merupakan teknik analisis efisiensi berbasis pemrograman linear yang digunakan untuk mengukur kinerja relatif dari suatu DMU yang memungkinkan penghitungan pada banyak (*multiple*) input dan output yang sulit untuk dihitung dengan metode perbandingan atau rasio (Charnes, Cooper & Rhodes, 1978).

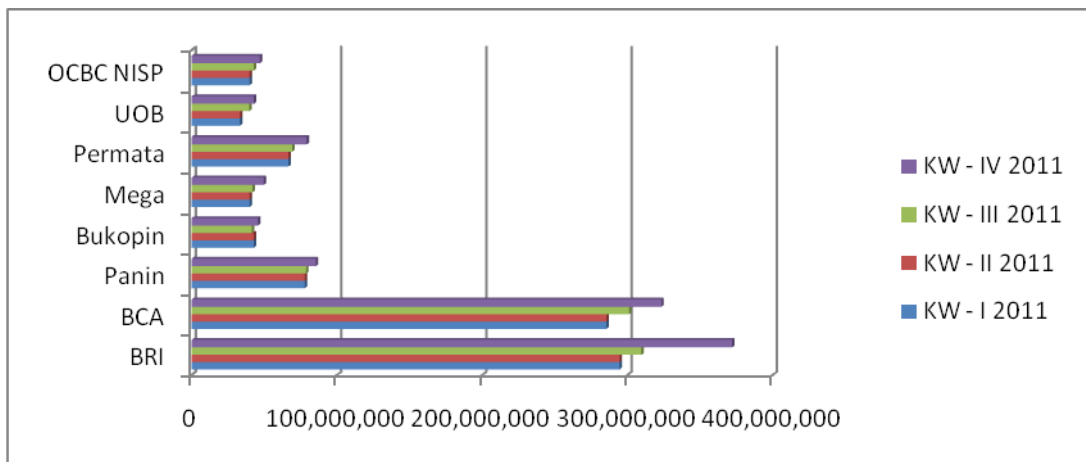
Penelitian ini menggunakan klasifikasi dasar model DEA berorientasi input. Orientasi ini berdasarkan pada keterbatasan kontrol oleh manajemen/ pengguna model DEA yang cenderung fokus terhadap input melalui *reducing cost* (Ozcan, 2008). Selain itu, pendekatan DEA yang digunakan dalam penelitian ini juga menggunakan model VRS (*Variable Returns to Scale*) yang dikembangkan oleh Banker (1984). Model dengan kondisi VRS akan memperlihatkan bahwa penambahan sejumlah faktor produksi (input) akan memberikan peningkatan ataupun penurunan kapasitas produksi (output). Selain alasan tersebut, semakin kompetitifnya pasar pembiayaan UMKM dan adanya regulasi perbankan membuat masing-masing DMU tidak dapat mencapai produksi dalam skala optimal karena adanya hambatan. *Software* yang digunakan untuk menghitung nilai efisiensi adalah MaxDEA dan untuk mengetahui persentase kontribusi variabel input-output dari masing-masing DMU digunakan *software* Banxia.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kondisi Objek Penelitian

Kondisi objek penelitian menjelaskan tentang pertumbuhan masing-masing dari variabel penelitian yang meliputi dana pihak ketiga (DPK), biaya operasional, dan pembiayaan UMKM selama periode penelitian yaitu sebelum dan sesudah adanya Peraturan BI No. 14/ 22/ PBI/ 2012. Persaingan di pasar pembiayaan UMKM dari masing-masing bank dalam mendapatkan DPK sangat kompetitif dan dua kelompok bank yang secara ketat bersaing dalam melakukan penghimpunan DPK yaitu BUMN dan BUSN (devisa). BUMN dan BUSN (devisa) mempunyai proporsi DPK sebesar 79,51% dari keseluruhan DPK bank umum di Indonesia, dimana BUMN memiliki proporsi 37,32% dan BUSN (devisa) memiliki proporsi 42,19% (Statistik Perbankan Indonesia, 2011). Sehingga, kedua kelompok bank ini menjadi sampel penelitian (*purposive sampling*). Berikut merupakan grafik 3 yang menjelaskan tentang pertumbuhan DPK dari masing-masing bank yang dijadikan sampel penelitian sebelum Peraturan BI No. 14/ 22/ PBI/ 2012:

Grafik 3: **Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga Sebelum Peraturan BI No. 14/ 22/ PBI/ 2012**

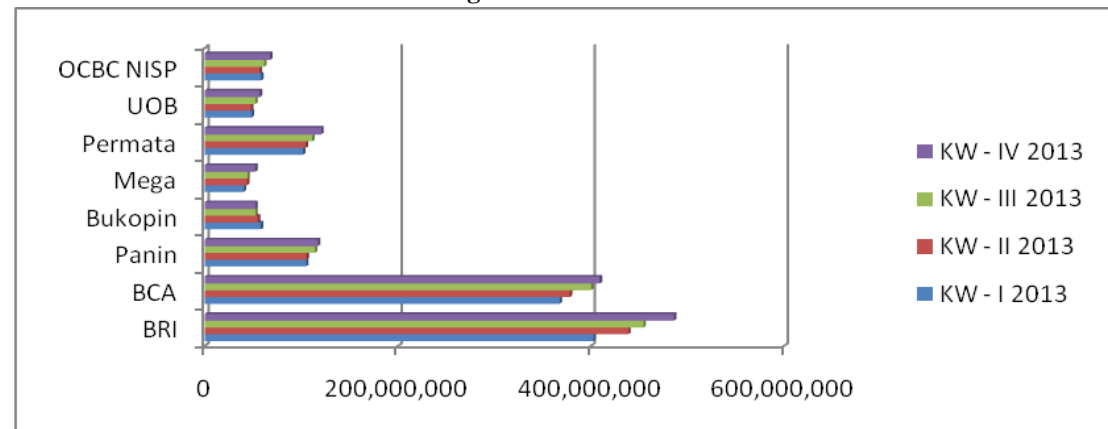


Sumber: Data Sekunder Olahan Peneliti, 2014 (satuan: jutaan rupiah)

Berdasarkan grafik 3 diketahui bahwa kemampuan Bank Rakyat Indonesia dan Bank Central Asia dalam melakukan penghimpunan DPK sebelum adanya Peraturan BI No. 14/ 22/ PBI/ 2012 mencapai jumlah yang lebih dominan dibandingkan dengan beberapa bank lainnya yang dijadikan sampel penelitian, dan kondisi ini konsisten dari kuartal I hingga kuartal IV tahun 2011. Sedangkan, kemampuan bank-bank lainnya dalam menghimpun DPK mengikuti diperingkat ketiga dan seterusnya dalam kuartal I hingga kuartal IV ditahun 2011.

Berikut merupakan grafik 4 tentang pertumbuhan DPK dari masing-masing bank yang dijadikan sampel penelitian sesudah adanya Peraturan BI No. 14/ 22/ PBI/ 2012:

Grafik 4: **Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga Sesudah Peraturan BI No. 14/ 22/ PBI/ 2012**

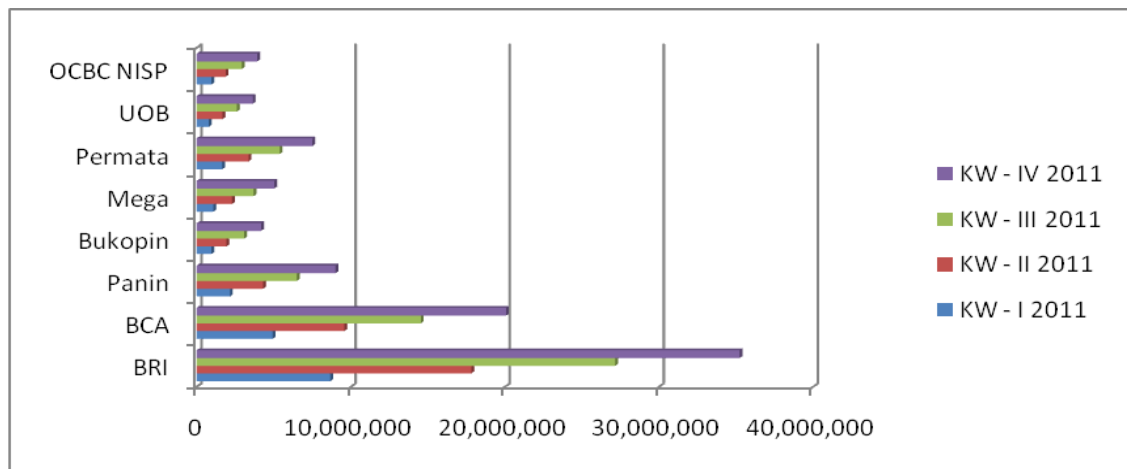


Sumber: Data Sekunder Olahan Peneliti, 2014 (satuan: jutaan rupiah)

Berdasarkan grafik 4 digambarkan bahwa kemampuan Bank Rakyat Indonesia dan Bank Central Asia dalam menghimpun DPK sesudah adanya Peraturan BI No. 14/ 22/ PBI/ 2012 lebih dominan dibandingkan dengan beberapa bank lainnya, dan kemampuan ini konsisten dari kuartal I hingga IV ditahun 2013. Sedangkan, kemampuan menghimpun DPK dari bank-bank lainnya mengikuti diperingkat ketiga dan seterusnya dalam kuartal I hingga IV ditahun 2013.

Berikut merupakan grafik 5 yang menjelaskan pertumbuhan biaya operasional sebelum Peraturan BI No. 14/ 22/ PBI/ 2012. Biaya operasional merupakan biaya yang dikeluarkan bank untuk membiayai kegiatan sehari-hari bank. Bank Rakyat Indonesia dan Bank Central Asia dalam mengeluarkan biaya operasional nilainya lebih besar dibandingkan dengan biaya operasional yang dikeluarkan beberapa bank lainnya, dan kondisi ini konsisten dari kuartal I hingga IV ditahun 2011. Sedangkan, pada bank-bank lainnya pengeluaran biaya operasionalnya lebih rendah dari Bank Rakyat Indonesia dan Bank Central Asia karena kemampuan bank-bank tersebut dalam menghimpun DPK juga lebih rendah dari kedua bank tersebut.

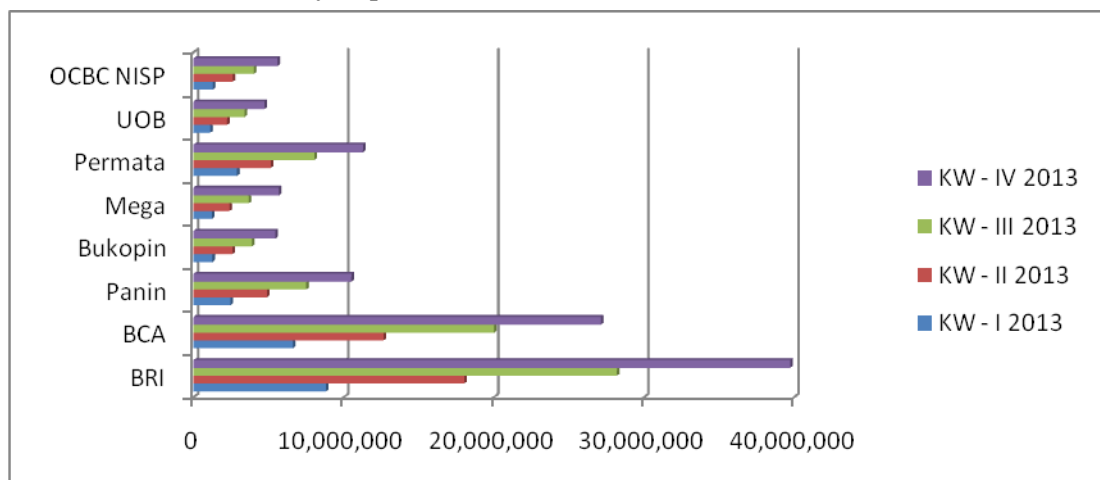
Grafik 5: Pertumbuhan Biaya Operasional Sebelum Peraturan BI No. 14/ 22/ PBI/ 2012



Sumber: Data Sekunder Olahan Peneliti, 2014 (satuan: jutaan rupiah)

Di bawah ini merupakan grafik 6 yang menggambarkan besarnya biaya operasional yang ditanggung Bank Rakyat Indonesia dan Bank Central Asia sesudah adanya Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/ 22/ PBI/ 2012 lebih dominan dibandingkan dengan beberapa bank lainnya, dan kondisi ini konsisten dari kuartal I hingga IV tahun 2013. Sedangkan, pada bank-bank lainnya pengeluaran biaya operasionalnya lebih rendah dari Bank Rakyat Indonesia dan Bank Central Asia dalam kuartal I hingga IV tahun 2013.

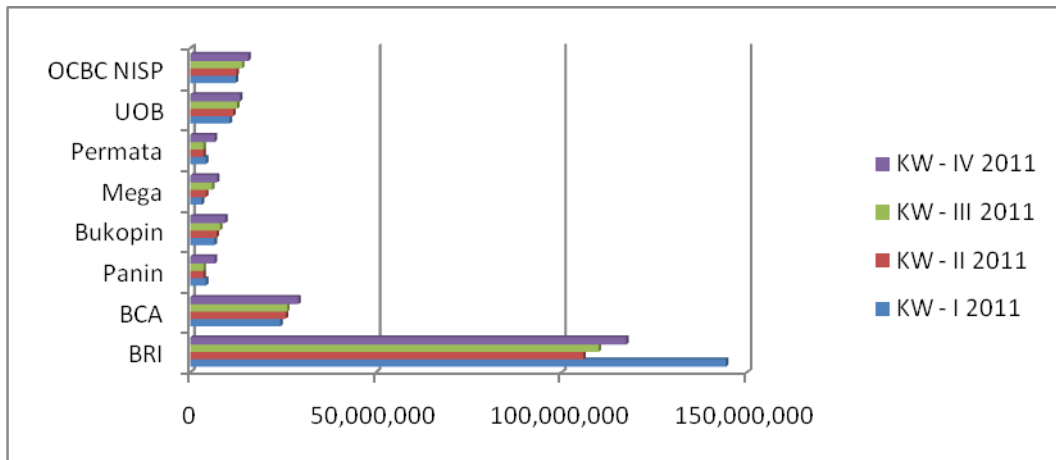
Grafik 6: Pertumbuhan Biaya Operasional Sesudah Peraturan BI No. 14/ 22/ PBI/ 2012



Sumber: Data Sekunder Olahan Peneliti, 2014 (satuan: jutaan rupiah)

Berikut merupakan grafik 7 yang menjelaskan tentang pertumbuhan pembiayaan UMKM dari masing-masing bank yang dijadikan sampel penelitian:

Grafik 7: Pertumbuhan Pembiayaan UMKM Sebelum Peraturan BI No. 14/ 22/ PBI/ 2012

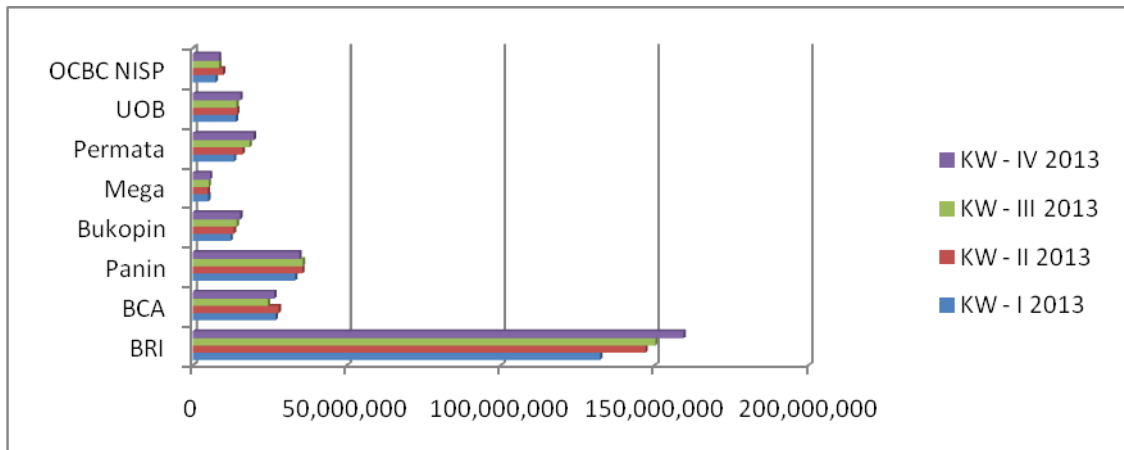


Sumber: Data Sekunder Olahan Peneliti, 2014 (satuan: jutaan rupiah)

Berdasarkan grafik 7 digambarkan bahwa pembiayaan UMKM yang diberikan oleh Bank Rakyat Indonesia dan Bank Central Asia sebelum adanya Peraturan BI No. 14/ 22/ PBI/ 2012 lebih dominan dibandingkan pembiayaan UMKM yang diberikan oleh bank-bank lainnya pada kuartal I hingga IV ditahun 2011. Kondisi ini menunjukkan bahwa kedua bank tersebut telah menjalankan fungsi intermediasi dalam pasar pembiayaan UMKM dengan baik. Kemampuan menghimpun dana dan menyalurkan kembali dana tersebut dalam bentuk kredit (pembiayaan) menunjukkan kinerja bank dalam upaya mendukung sektor riil (UMKM) sebagai penopang perekonomian.

Berikut merupakan grafik 8 tentang pertumbuhan pembiayaan UMKM dari masing-masing bank yang dijadikan sampel penelitian sesudah adanya Peraturan BI No. 14/ 22/ PBI/ 2012:

Grafik 8: Pertumbuhan Pembiayaan UMKM Sesudah Peraturan BI No. 14/ 22/ PBI/ 2012



Sumber: Data Sekunder Olahan Peneliti, 2014 (satuan: jutaan rupiah)

Berdasarkan grafik 8 digambarkan bahwa pembiayaan UMKM yang diberikan oleh Bank Rakyat Indonesia, Bank Pan Indonesia, dan Bank Central Asia sesudah adanya Peraturan BI No. 14/ 22/ PBI/ 2012 lebih dominan dari beberapa bank lainnya, dan kondisi ini konsisten dari kuartal I hingga kuartal IV tahun 2013. Selain itu, kemampuan bank-bank lainnya dalam pembiayaan UMKM juga menjadi lebih baik dibandingkan sebelum adanya peraturan. Hanya Bank Central Asia yang mengalami sedikit penurunan jumlah pembiayaan UMKM sesudah adanya Peraturan BI No. 14/ 22/ PBI/ 2012.

Kondisi Efisiensi Bank Sebelum dan Sesudah Peraturan BI No. 14/ 22/ PBI/ 2012

Efisiensi bank merupakan salah satu indikator mengukur kinerja dari masing-masing bank di Indonesia. Efisiensi bank dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan pendekatan non-parametrik *Data Envelopment Analysis* (DEA) dengan asumsi *Variable Return to Scale* (VRS) yang berorientasi pada input. Kinerja bank dikatakan efisien apabila angka rasionya mencapai 1, sedangkan bank dengan angka rasio mendekati 0 dinyatakan sebagai bank yang relatif tidak efisien atau relatif tidak efisien (Silkman *et al.*, 1986). Berdasarkan pengujian efisiensi bank dengan pendekatan non-parametrik *Data Envelopment Analysis* menggunakan *software* MaxDEA didapatkan hasil seperti dalam tabel 1:

Tabel 1: Angka Rasio Efisiensi Bank Sebelum Peraturan BI No. 14/ 22/ PBI/ 2012

DMU	Nilai Efisiensi				Rata-Rata
	2011				
	KW - I	KW - II	KW - III	KW - IV	
BCA	0,324084	0,42833	0,41287	0,41287	0,39
BRI	1	1	1	1	1
Bukopin	0,833305	0,870088	0,9564	0,9564	0,90
Mega	0,741016	0,833671	0,94766	0,94766	0,87
OCBC NISP	0,964844	0,97137	1	1	0,98
Panin	0,411872	0,426789	0,503724	0,503724	0,46
Permata	0,518666	0,499671	0,57288	0,57288	0,54
UOB	1	1	1	1	1
Rata-Rata Efisiensi = 0,77					0,7675

Sumber: Data Sekunder Olahan Peneliti, 2014

Berdasarkan tabel 1 dapat diketahui bahwa bank yang efisien dalam pasar pembiayaan UMKM sebelum adanya Peraturan BI No. 14/ 22/ PBI/ 2012 dicapai oleh Bank Rakyat Indonesia dan Bank UOB Indonesia. Sedangkan, Bank Bukopin, Bank Mega dan Bank OCBC NISP merupakan bank dengan kinerja yang mendekati efisien, tetapi termasuk dalam bank yang relatif tidak efisien. Selain itu, terdapat tiga bank dengan tingkat efisiensi relatif terendah dalam melakukan pembiayaan UMKM yaitu Bank Central Asia, Bank Permata, dan Bank Pan Indonesia.

Berikut merupakan tabel 2 yang menggambarkan nilai efisiensi bank sesudah adanya Peraturan BI No. 14/ 22/ PBI/ 2012:

Tabel 2: Angka Rasio Efisiensi Bank Sesudah Peraturan BI No. 14/ 22/ PBI/ 2012

DMU	Nilai Efisiensi				Rata-Rata
	2013				
	KW - I	KW - II	KW - III	KW - IV	
BCA	0.29581	0.304445	0.262666	0.272448	0,28
BRI	1	1	1	1	1
Bukopin	0.886768	0.867837	1	1	0,94

DMU	Nilai Efisiensi				Rata-Rata
	2013				
	KW - I	KW - II	KW - III	KW - IV	
Mega	1	1	1	1	1
OCBC NISP	0.859297	0.856888	0.847947	0.842659	0,85
Panin	1	1	1	0.945098	0,99
Permata	0.474972	0.502663	0.579867	0.555506	0,53
UOB	1	1	1	1	1
Rata-Rata Efisiensi = 0,82					0,82375

Sumber: Data Sekunder Olahan Peneliti, 2014

Berdasarkan tabel 2 dapat dilihat bahwa angka rasio efisiensi pada masing-masing bank sesudah adanya Peraturan BI No. 14/ 22/ PBI/ 2012 tentang pembiayaan UMKM berbeda-beda. Terdapat tiga bank yang telah menunjukkan kinerja terbaiknya dalam menjalankan fungsi intermediasi di dalam pasar pembiayaan UMKM yaitu Bank Rakyat Indonesia, Bank UOB Indonesia, dan Bank Mega. Sedangkan, bank yang mendekati efisien dalam melakukan pembiayaan UMKM yaitu Bank OCBC NISP, Bank Pan Indonesia, dan Bank Bukopin, tetapi bank-bank tersebut termasuk dalam bank dengan kondisi relatif tidak efisien dalam pembiayaan UMKM. Selain bank-bank tersebut terdapat Bank Central Asia dan Bank Permata yang menjadi bank dengan angka rasio efisiensi relatif paling rendah.

Potential Improvement dari Bank-Bank dengan Nilai Efisiensi Relatif Terendah Sebelum dan Sesudah Peraturan BI No. 14/ 22/ PBI/ 2012

Selain dapat mengukur efisiensi kinerja bank, pendekatan non-parametrik DEA juga dapat melihat sumber inefisiensi dan mengukur berapa nilai yang diperlukan untuk perbaikan potensial (*potential improvement*) dari masing-masing variabel input dan output yang dimiliki DMU tersebut (Endri, 2011). *Potential improvement* merupakan nilai dari kenaikan yang diharapkan agar angka rasio DMU tersebut mencapai efisiensi. Berikut merupakan tabel 3 yang menjelaskan tentang *potential improvement* dari masing-masing variabel input-output sebelum adanya Peraturan BI No. 14/ 22/ PBI/ 2012:

Tabel 3: *Potential Improvement* Kuartal I 2011

DMU	<i>Potential Improvement</i> (Kuartal I 2011)		
	Dana Pihak Ketiga	Biaya Operasional	Pembiayaan UMKM
BCA	-217.227.880,5	-3.337.509,278	0
Panin	-46.220.115	-1.364.868	6.441.261
Permata	-30.038.631	-871.448	6.453.341

Sumber: Data Sekunder Olahan Peneliti, 2014 (satuan: jutaan rupiah)

Berdasarkan tabel 3 menunjukkan nilai variabel input dan output yang memiliki potensi perbaikan (*potential improvement*) agar DMU tersebut mencapai efisiensi. Tanda positif menunjukkan peningkatan sementara tanda negatif menunjukkan penurunan/ pengurangan. Pada kuartal I tahun 2011 kinerja Bank Central Asia dapat menjadi efisien apabila mengurangi variabel inputnya berupa DPK sebesar 217.227.880,5 (jutaan rupiah) dan biaya operasional sebesar 3.337.509,278 (jutaan rupiah), tanpa melakukan perbaikan pada variabel outputnya yaitu pembiayaan UMKM. Sedangkan, Bank Pan Indonesia dapat menjadi efisien apabila mengurangi variabel inputnya berupa DPK sebesar 46.220.115 (jutaan rupiah) dan biaya operasional sebesar 1.364.868 (jutaan rupiah), serta meningkatkan pembiayaan UMKM sebesar 6.441.261 (jutaan

rupiah). Sedangkan, Bank Permata akan menjadi efisien apabila mengurangi variabel inputnya berupa DPK sebesar 30.038.631 (jutaan rupiah) dan biaya operasional sebesar 871.448 (jutaan rupiah), serta meningkatkan pembiayaan UMKM sebesar 6.453.341 (jutaan rupiah).

Tabel 4: *Potential Improvement* Kuartal II 2011

DMU	<i>Potential Improvement (Kuartal II 2011)</i>		
	Dana Pihak Ketiga	Biaya Operasional	Pembiayaan UMKM
BCA	-213.216.232,4	-5.483.449,58	0
Panin	-44.698.342	-2.634.283	8.032.660
Permata	-33.324.355	-1.689.754	8.038.084

Sumber: Data Sekunder Olahan Peneliti, 2014 (satuan: jutaan rupiah)

Berdasarkan tabel 4 menunjukkan pada kuartal II tahun 2011 kinerja Bank Central Asia dapat menjadi efisien apabila mengurangi variabel inputnya berupa DPK sebesar 213.216.232,4 (jutaan rupiah) dan biaya operasional sebesar 5.483.449,58 (jutaan rupiah), tanpa melakukan perbaikan pada variabel pembiayaan UMKM. Sedangkan, pada Bank Pan Indonesia supaya efisien bank tersebut perlu mengurangi variabel inputnya berupa DPK sebesar 44.698.342 (jutaan rupiah) dan biaya operasional sebesar 2.634.283 (jutaan rupiah), serta meningkatkan pembiayaan UMKM sebesar 8.032.660 (jutaan rupiah). Sedangkan, Bank Permata akan menjadi efisien apabila mengurangi variabel inputnya berupa DPK sebesar 33.324.355 (jutaan rupiah) dan biaya operasional sebesar 1.689.754 (jutaan rupiah), serta meningkatkan pembiayaan UMKM sebesar 8.038.084 (jutaan rupiah).

Tabel 5: *Potential Improvement* Kuartal III 2011

DMU	<i>Potential Improvement (Kuartal III 2011)</i>		
	Dana Pihak Ketiga	Biaya Operasional	Pembiayaan UMKM
BCA	-224.706.339	-8.546.899,578	0
Panin	-39.156.471	-3.898.312	9.015.902
Permata	-29.631.927	-2.783.546	9.022.285

Sumber: Data Sekunder Olahan Peneliti, 2014 (satuan: jutaan rupiah)

Berdasarkan tabel 5 pada kuartal III tahun 2011 kinerja Bank Central Asia dapat menjadi efisien apabila mengurangi variabel inputnya berupa DPK sebesar 224.706.339 (jutaan rupiah) dan biaya operasional sebesar 8.546.899,578 (jutaan rupiah), tanpa perlu melakukan perubahan nilai pada pembiayaan UMKM. Sedangkan, pada Bank Pan Indonesia agar menjadi efisien perlu mengurangi variabel inputnya berupa DPK sebesar 39.156.471 (jutaan rupiah) dan biaya operasional sebesar 3.898.312 (jutaan rupiah), serta meningkatkan pembiayaan UMKM sebesar 9.015.902 (jutaan rupiah). Sedangkan, pada Bank Permata akan menjadi efisien apabila mengurangi variabel inputnya berupa DPK sebesar 29.631.927 (jutaan rupiah) dan biaya operasional sebesar 2.783.546 (jutaan rupiah), serta meningkatkan pembiayaan UMKM sebesar 9.022.285 (jutaan rupiah).

Tabel 6: *Potential Improvement* Kuartal IV 2011

DMU	<i>Potential Improvement (Kuartal IV 2011)</i>		
	Dana Pihak Ketiga	Biaya Operasional	Pembiayaan UMKM
BCA	-224.706.339	-8.546.899,578	0
Panin	-39.156.471	-3.898.312	9.015.902
Permata	-29.631.927	-2.783.546	9.022.285

Sumber: Data Sekunder Olahan Peneliti, 2014 (satuan: jutaan rupiah)

Berdasarkan tabel 6 pada kuartal IV tahun 2011 kinerja Bank Central Asia akan menjadi efisien apabila mengurangi variabel inputnya berupa DPK sebesar 224.706.339 (jutaan rupiah) dan

biaya operasional sebesar 8.546.899,578 (jutaan rupiah), tanpa melakukan perbaikan nilai pada pembiayaan UMKM. Sedangkan, Bank Pan Indonesia dapat menjadi efisien apabila mengurangi variabel inputnya berupa DPK sebesar 39.156.471 (jutaan rupiah) dan biaya operasional sebesar 3.898.312 (jutaan rupiah), serta meningkatkan pembiayaan UMKM sebesar 9.015.902 (jutaan rupiah). Sedangkan, Bank Permata akan menjadi efisien apabila mengurangi variabel inputnya berupa DPK sebesar 29.631.927 (jutaan rupiah) dan biaya operasional sebesar 2.783.546 (jutaan rupiah), serta meningkatkan pembiayaan UMKM sebesar 9.022.285 (jutaan rupiah).

Berikut merupakan tabel 5 yang menjelaskan terkait *potential improvement* masing-masing variabel input-output penelitian periode sesudah adanya Peraturan BI No. 14/ 22/ PBI/ 2012:

Tabel 7: *Potential Improvement* Kuartal I 2013

DMU	<i>Potential Improvement (Kuartal I 2013)</i>		
	Dana Pihak Ketiga	Biaya Operasional	Pembiayaan UMKM
BCA	-280.263.268,2	-4.661.128,329	0
Permata	-53.526.410,17	-1.780.830,512	0

Sumber: Data Sekunder Olahan Peneliti, 2014 (satuan: jutaan rupiah)

Berdasarkan tabel 7 menunjukkan pada kuartal I tahun 2013 kinerja Bank Central Asia dapat menjadi efisien apabila mengurangi variabel inputnya berupa DPK sebesar 280.263.268,2 (jutaan rupiah) dan biaya operasional sebesar 4.661.128,329 (jutaan rupiah), tanpa perlu melakukan perubahan nilai pada pembiayaan UMKM. Sedangkan, Bank Permata akan menjadi efisien apabila mengurangi variabel inputnya berupa DPK sebesar 53.526.410,17 (jutaan rupiah) dan biaya operasional sebesar 1.780.830,512 (jutaan rupiah), tanpa perlu melakukan perubahan nilai pada pembiayaan UMKM.

Tabel 8: *Potential Improvement* Kuartal II 2013

DMU	<i>Potential Improvement (Kuartal II 2013)</i>		
	Dana Pihak Ketiga	Biaya Operasional	Pembiayaan UMKM
BCA	-290.524.554,3	-8.801.459,615	0
Permata	-52.226.781,69	-2.700.696,049	0

Sumber: Data Sekunder Olahan Peneliti, 2014 (satuan: jutaan rupiah)

Berdasarkan tabel 8 menunjukkan pada kuartal II tahun 2013 kinerja Bank Central Asia dapat menjadi efisien apabila mengurangi variabel inputnya berupa DPK sebesar 290.524.554,3 (jutaan rupiah) dan biaya operasional sebesar 8.801.459,615 (jutaan rupiah), tanpa perlu melakukan perubahan nilai pada pembiayaan UMKM. Sedangkan, Bank Permata akan menjadi efisien apabila mengurangi variabel inputnya berupa DPK sebesar 52.226.781,69 (jutaan rupiah) dan biaya operasional sebesar 2.700.696,049 (jutaan rupiah), tanpa perlu melakukan perubahan nilai pada pembiayaan UMKM.

Tabel 9: *Potential Improvement* Kuartal III 2013

DMU	<i>Potential Improvement (Kuartal III 2013)</i>		
	Dana Pihak Ketiga	Biaya Operasional	Pembiayaan UMKM
BCA	-317.502.436,6	-14.766.534,67	0
Permata	-46.883.340,84	-3.462.140,927	0

Sumber: Data Sekunder Olahan Peneliti, 2014 (satuan: jutaan rupiah)

Berdasarkan tabel 9 menunjukkan pada kuartal III tahun 2013 kinerja Bank Central Asia dapat menjadi efisien apabila mengurangi variabel inputnya berupa DPK sebesar 317.502.436,6 (jutaan rupiah) dan biaya operasional sebesar 14.766.534,67 (jutaan rupiah), tanpa perlu melakukan perubahan nilai pada pembiayaan UMKM. Sedangkan, Bank Permata akan menjadi efisien apabila mengurangi variabel inputnya berupa DPK sebesar 46.883.340,84 (jutaan rupiah)

dan biaya operasional sebesar 3.462.140,927 (jutaan rupiah), tanpa perlu melakukan perubahan nilai pada pembiayaan UMKM.

Tabel 10: *Potential Improvement* Kuartal IV 2013

DMU	<i>Potential Improvement (Kuartal IV 2013)</i>		
	Dana Pihak Ketiga	Biaya Operasional	Pembiayaan UMKM
BCA	-319.436.166,8	-19.753.903,6	0
Permata	-53.784.489,22	-5.017.516,355	0

Sumber: Data Sekunder Olahan Peneliti, 2014 (satuan: jutaan rupiah)

Berdasarkan tabel 10 menunjukkan pada kuartal IV tahun 2013 kinerja Bank Central Asia dapat menjadi efisien apabila mengurangi variabel inputnya berupa DPK sebesar 319.436.166,8 (jutaan rupiah) dan biaya operasional sebesar 19.753.903,6 (jutaan rupiah), tanpa perlu melakukan perubahan nilai pada pembiayaan UMKM. Sedangkan, Bank Permata akan menjadi efisien apabila mengurangi variabel inputnya berupa DPK sebesar 53.784.489,22 (jutaan rupiah) dan biaya operasional sebesar 5.017.516,355 (jutaan rupiah), tanpa perlu melakukan perubahan nilai pada pembiayaan UMKM.

Analisis *Data Envelopment Analysis* atau DEA selain menghasilkan informasi mengenai kondisi setiap variabel input dan output yang memiliki potensi perbaikan (*potential improvement*) untuk mencapai efisiensi, DEA juga dapat menganalisis DMU mana saja yang dapat menjadi *benchmark* bagi DMU yang relatif tidak efisien. Sebelum adanya Peraturan BI No. 14/ 22/ PBI/ 2012 terdapat beberapa bank yang tidak lagi memerlukan perbaikan pada setiap variabel input-outputnya, tetapi bank-bank tersebut akan menjadi *reference set* atau *benchmark* bagi bank lain yang relatif tidak efisien yaitu Bank Rakyat Indonesia, Bank OCBC NISP, dan Bank UOB Indonesia. Sedangkan, pada periode sesudah adanya Peraturan BI No. 14/ 22/ PBI/ 2012 maka Bank Rakyat Indonesia, Bank Pan Indonesia, Bank Mega, Bank Bukopin, dan Bank UOB Indonesia yang menjadi *reference set* atau *benchmark* bagi bank-bank yang relatif tidak efisien.

Hasil Komparasi Efisiensi Bank Sebelum dan Sesudah Peraturan BI No. 14/ 22/ PBI/ 2012

Hipotesis penelitian yang menjadi jawaban sementara dari penelitian ini adalah pembiayaan UMKM yang dilakukan bank berpengaruh terhadap efisiensi bank sebelum maupun sesudah adanya Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/ 22/ PBI/ 2012. Untuk menjawab kebenaran hipotesis tersebut maka perlu dilakukan penghitungan rata-rata efisiensi bank sebelum dan sesudah adanya Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/ 22/ PBI/ 2012. Berdasarkan hasil perhitungan rata-rata nilai efisiensi (tabel 1 dan tabel 2) didapatkan hasil bahwa rata-rata efisiensi bank di Indonesia periode sebelum dan sesudah adanya Peraturan BI No. 14/ 22/ PBI/ 2012 mengalami peningkatan efisiensi dalam pasar pembiayaan UMKM dari 0,77 menjadi 0,82. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan UMKM yang dilakukan bank berpengaruh terhadap efisiensi bank sebelum maupun sesudah adanya Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/ 22/ PBI/ 2012

Implikasi dari Hasil Komparasi Efisiensi Bank Sebelum dan Sesudah Peraturan BI No. 14/ 22/ PBI/ 2012

Berdasarkan uji hipotesis didapatkan hasil bahwa terdapat pengaruh pada efisiensi bank baik sebelum Peraturan BI No. 14/ 22/ PBI/ 2012 maupun sesudah adanya peraturan tersebut. Nilai efisiensi bank tidak mengalami penurunan sesudah adanya peraturan tersebut, tetapi justru mengalami peningkatan nilai efisiensi. Sehingga, adanya Peraturan BI No. 14/ 22/ PBI/ 2012 dapat terus dilanjutkan. Peraturan dari Bank Indonesia tersebut tidak mendistorsi sektor keuangan, bahkan merupakan bentuk dukungan kepada sektor riil (UMKM) agar mampu berkembang sebagai penopang perekonomian Indonesia.

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa bank yang mencapai angka rasio efisiensi relatif terendah dalam pasar pembiayaan UMKM. Penyebab nilai efisiensi yang relatif rendah yang dicapai DMU tersebut dikarenakan masih terdapat variabel-variabel penyebab relatif inefisiensi. Apabila masing-masing bank yang memiliki efisiensi relatif terendah dalam pembiayaan UMKM melakukan perbaikan nilai pada variabel input-outputnya sesuai dengan nilai pada tabel-tabel *potential improvement*, serta mengacu pada kinerja bank-bank yang telah menjadi *benchmark* maka memungkinkan bagi bank-bank tersebut untuk mencapai angka rasio efisiensi bank senilai 1

sehingga kepercayaan masyarakat terutama pelaku UMKM juga turut meningkat karena manajemen bank semakin menunjukkan kinerja terbaiknya.

Terdapat tiga bank yang menjadi *benchmark* (λ) bagi bank-bank yang relatif tidak efisien sebelum adanya Peraturan BI No. 14/ 22/ PBI/ 2012 yaitu Bank Rakyat Indonesia, Bank OCBC NISP, dan Bank UOB Indonesia. Sedangkan, sesudah adanya Peraturan BI No. 14/ 22/ PBI/ 2012 terdapat lima bank yang menjadi *reference set* atau *benchmark* bagi bank lain yang relatif tidak efisien yaitu Bank Rakyat Indonesia, Bank Pan Indonesia, Bank Mega, Bank UOB Indonesia, dan Bank Bukopin.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari adanya penelitian ini antara lain:

1. Terdapat perbedaan efisiensi sebelum dan sesudah adanya Peraturan BI No. 14/ 22/ PBI/ 2012. Efisiensi bank mengalami peningkatan dari rata-rata angka rasio 0,77 pada periode sebelum adanya Peraturan BI No. 14/ 22/ PBI/ 2012 menjadi 0,82 pada periode sesudah adanya peraturan tersebut.
2. Fungsi intermediasi bank tidak akan terganggu dengan adanya Peraturan BI No. 14/ 22/ PBI/ 2012 karena peraturan tersebut tidak mendistorsi sektor keuangan. Sehingga, Peraturan BI No. 14/ 22/ PBI/ 2012 dapat terus dijalankan. Peraturan tersebut sebagai bentuk dukungan Bank Indonesia terhadap sektor riil (UMKM).
3. Terdapat tiga bank yang menjadi *benchmark* diantaranya yakni Bank Rakyat Indonesia, Bank OCBC NISP, dan Bank UOB Indonesia sebelum adanya Peraturan BI No. 14/ 22/ PBI/ 2012. Sedangkan sesudah adanya Peraturan BI No. 14/ 22/ PBI/ 2012 terdapat lima bank yang menjadi *benchmark* yaitu Bank Rakyat Indonesia, Bank Pan Indonesia, Bank Mega, Bank Bukopin, dan Bank UOB Indonesia
4. Terdapat tiga bank yang memiliki angka rasio efisiensi relatif terendah dalam melakukan pembiayaan UMKM sebelum adanya Peraturan BI No. 14/ 22/ PBI/ 2012 yaitu Bank Central Asia, Bank Pan Indonesia, dan Bank Permata. Sedangkan sesudah adanya Peraturan BI No. 14/ 22/ PBI/ 2012 terdapat dua bank yang memiliki angka rasio efisiensi relatif terendah yaitu Bank Central Asia dan Bank Permata.

Saran

Saran yang dapat peneliti sampaikan dari adanya penelitian ini antara lain:

1. Peraturan BI No. 14/ 22/ PBI/ 2012 dapat terus dijalankan karena peraturan tersebut sebagai bentuk dukungan Bank Indonesia kepada sektor riil (UMKM), serta tidak mendistorsi sektor keuangan.
2. Bank-bank yang belum mencapai efisiensi atau memiliki angka rasio efisiensi relatif terendah dapat melakukan perbaikan variabel input-output (*potential improvement*) dan melihat kinerja dari bank-bank yang menjadi *benchmark* agar menjadi efisien dalam melakukan pembiayaan UMKM.
3. Penelitian selanjutnya dapat menyempurnakannya dengan menambah sampel penelitian, mengingat jumlah bank umum di Indonesia sangat banyak. Memungkinkan juga melakukan pengujian efisiensi sebelum dan sesudah adanya Peraturan BI No. 14/ 22/ PBI/ 2012 pada Bank Umum Syariah dan Bank Pembangunan Daerah.
4. Penelitian selanjutnya dapat melakukan pengujian efisiensi dengan pendekatan *frontier* melalui model VRS (*Variable Return to Scale*) dengan fokus kepada output, sehingga dimungkinkan untuk melakukan penambahan variabel input-output.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, *et al.* 2009. *Kinerja Efisiensi Teknis Bank Pembangunan Daerah: Pendekatan Data Envelopment Analysis (DEA)*. Surabaya: Perbanas
- Alam, Purnama. 2008. Analisis Faktor –Faktor yang Menyebabkan Peningkatan NPL Terhadap Penyaluran Kredit di Sektor UMKM: Studi Kasus pada Bank BRI. Bogor: Pascasarjana Manajemen dan Bisnis Institut Pertanian Bogor
- Arafat, Wilson. 2006. *Manajemen Perbankan Indonesia*. Jakarta: LP3ES

- Buchory, Herry Achmad. 2006. *The Effect Implementation of Financial Intermediary Function, Risk Management Application and Bank Capital Structure on Banking Financial Performance*. Bandung: Fakultas Ekonomi Padjadjaran
- Charnes, Cooper, *et al.* 1978. Measuring the efficiency of decision making units. *European Journal of Operational Research*, 2(6) : 429-444
- Debreu, G. 1951. The coefficient of resource utilization. *Econometrica*, 19 (3): 273–292
- Dendawijaya, Lukman. 2003. *Manajemen Perbankan Edisi kedua*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Endri. 2011. *Evaluasi Teknis Perbankan Syariah di Indonesia: Aplikasi Two-Stage Data Envelopment Analysis*. Bogor: STEI Tazkia
- Farrel, M.J. 1957. The measurement of productive efficiency. *Journal of the Royal Statistical Society, Series A CXX*, (Part 3) : 253-290
- Hadad, *et al.* 2003. *Analisis Efisiensi Industri Perbankan Indonesia: Penggunaan Metode Parametrik Data Envelopment Analysis (DEA)*. Paper dari Direktorat Penelitian dan Pengetahuan Perbankan: Bank Indonesia
- Jumingan. 2006. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT.Bumi Aksara
- Koopmans, T. C. 1951. An analysis of production as an efficient combination of activities. In T. C. Koopmans (eds) *Activity Analysis of Production and Allocation*: Cowles Commission
- Nicholson, Walter. 2002. *Mikroekonomi Intermediate dan Aplikasinya*. Jakarta: Erlangga
- Ozcan, Yasar A. 2008. *Health Care Benchmarking and Performance Evaluation*. New York: Springer
- Otoritas Jasa Keuangan. 2011. *Laporan Publikasi Bank Umum*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan
- Otoritas Jasa Keuangan. 2013. *Laporan Publikasi Bank Umum*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam Rangka Pengembangan UMKM. 2012. Jakarta: Bank Indonesia
- Ramanathan. 2003. *An Introduction to Data Envelopment Analysis: A Tool for Performance Measurement*. Sage Production Team: D Srilatha, Rajib Chatterjee & Santosh Rawat
- Silkman, Sexton T.R, *et al.* 1986. Data envelopment analysis: critique and extensions. In: Silkman, R.H (eds), *Measuring efficiency: an assessment of data envelopment analysis vol 32*: Josse-Bass, pp : 73-105
- Tabloid Kontan Mingguan. 2013, 11-17 Maret. Pasar Bebas ASEAN 2015: UMKM Kita Siap?
- Taswan. 2006. *Manajemen Perbankan*. Yogyakarta : UPP AMP YKPN